



PERUMUSAN

**RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
TAHUN 2019**

JAKARTA, 2 – 4 MEI 2019

Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmaanirrohiim*, kami yang bertanda-tangan di bawah ini atas nama perwakilan peserta “**Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019**” bersepakat dan menyetujui perumusan hasil **Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019** yang dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 4 Mei 2019 di Hotel Sultan, sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga berkomitmen mendukung program perlindungan sosial yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan melalui penguatan **Program Keluarga Harapan**;
2. Untuk mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah, melalui pemenuhan komitmen Dana Sharing Anggaran Pemerintah Daerah dan dukungan dari semua pihak terkait;
3. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) melalui Aplikasi SIKS NG perlu dilakukan secara periodik, Pemerintah Daerah diharapkan proaktif dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan dan diperlukan kerjasama antar kementerian/lembaga dalam rangka perbaikan sasaran program;
4. Memperhatikan dan mencermati berbagai masukan dari Bappenas, Bank Dunia, Bank Himbara Lembaga Penelitian MicroSave dan Mahkota/ Semeru, dalam hal Rekomendasi Hasil Penelitian Dampak PKH; Kementerian Sosial melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga berkomitmen melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan PKH melalui:
 - a. Meningkatkan anggaran bantuan sosial sebesar 2 kali Indeks Bantuan PKH pada tahun 2019 berdasarkan proporsi beban keluarga (maksimal 4 jiwa) dan bantuan tetap untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga;
 - b. Integrasi Bisnis Proses PKH dalam Sistem Informasi Manajemen (e-PKH);
 - c. Peningkatan kapasitas kepesertaan PKH (kualitas modul P2K2 dan verifikasi Komitmen untuk seluruh anggota keluarga KPM PKH);

- d. Penguatan manajemen SDM pelaksana PKH (analisis beban kerja dan jabatan SDM PKH);
 - e. Mengupayakan peningkatan jumlah KPM Graduasi Sejahtera Mandiri;
 - f. PKH Adaptif untuk korban bencana yang mengalami degradasi taraf kesejahteraan;
 - g. Perluasan jangkauan PKH Akses di daerah sangat sulit dan terpencil khususnya pada 920 Kecamatan di 24 Provinsi
5. Kementerian Sosial melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Pemerintah Daerah bersepakat untuk secara bersama-sama menjadikan PKH sebagai episentrum program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui perbaikan kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai;
 6. Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Kabupaten/ Kota akan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan di daerahnya masing-masing mengacu pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional PKH di Jakarta.

Jakarta, 3 Mei 2019

Atas nama perwakilan peserta Rakornas:



Dr. Rinny Tamuntuan